

2. KEUANGAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan pada tahun 2017 antara lain : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bagian Pengendalian Pembangunan Setda, Bagian Perekonomian Setda, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2017 sejumlah Rp. 47.772.315.177,00 atau sebesar 2,388% dari total APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.613.704.761,00. Alokasi anggaran untuk urusan Keuangan dapat direalisasikan sebesar 24.774.285.268,00 atau 51,86%. Adapun program dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. III.E.2.1
Program dan Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan
Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung	47.772.315.177,00	24.774.285.268,00
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.596.904.177,00	12.523.926.701,00
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.503.151.000,00	7.347.240.663,00
c.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.316.260.000,00	3.810.724.409,00
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	320.000.000,00	229.916.600,00
e.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.036.000.000,00	862.476.895,00
2.	Belanja Tidak Langsung	341.891.628.853,00	330.428.205.005,00
	Total	389.663.944.030,00	355.202.490.273,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel perlu didukung oleh beberapa faktor diantaranya, sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, pengembangan sistem informasi keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah oleh perangkat daerah BPPKAD antara lain : **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah** yang bertujuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak (non PBB P2 dan BPHTB), **Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**, kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan menu tambahan dalam SPKD yaitu aplikasi untuk melaporkan inventaris barang secara tepat waktu oleh perangkat daerah, **Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua** bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Wonosobo agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, **Peningkatan Kapasitas Pengurus BMD**, berupa pelatihan dan sosialisasi pengurus BMD untuk peningkatan sumber daya manusia para pengurus BMD, **Implementasi Transaksi Non tunai** bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, **Implementasi SP2D Online** berupa pembinaan teknis kepada seluruh Bendahara dan PPK-SKPD agar memahami penerapan SP2D Online, **Pengadaan Aplikasi Persediaan** bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi pencatatan persediaan agar lebih terukur, **Penyusunan Aplikasi PBB P2** berupa pengadaan Aplikasi Instal Data Sismiop PBB P2 yang bertujuan untuk penyusunan data PBB yang lebih valid. Pada tahun 2017 BPPKAD melaksanakan kegiatan Penyusunan DED Gedung Baru untuk menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan gedung kantor yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2019. **Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017** adalah kegiatan **Fasilitasi e-Payment Getaway** dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 karena kegiatan tersebut tidak boleh dipihakketigakan karena merupakan kerjasama murni antara BPPKP dan Bank Jateng. Selain itu proses host to host ternyata baru dapat dijalankan setelah SIMDA Pendapatan sudah fix tanpa kendala, sementara itu aplikasi SIMDA Pendapatan yang baru terpasang pada anggaran Perubahan masih dalam masa uji coba dan penyesuaian untuk dapat dioperasikan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah juga dilaksanakan oleh perangkat daerah selain BPPKAD yaitu melalui kegiatan : Fasilitasi Pencetakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dilaksanakan oleh Dinas perdagangan Koperasi dan UKM, Penyusunan standar satuan harga dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Setda dan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dilaksanakan oleh kecamatan Kalibawang.

2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan program pada urusan Keuangan maka perlu adanya kegiatan pendukung yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan pendukung utama kelancaran program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya melalui kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 27 unit, kendaraan roda dua sebanyak 43 unit. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor berupa pengadaan perfortor, meja dan kursi pelayanan, komputer, LCD Proyektor, Faximile, radio HT dan CCTV. Kegiatan pendukung lainnya adalah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Formal** yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kebutuhan aparatur pengelola keuangan yang handal dapat terpenuhi. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan LPMP Jawa Tengah.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah : Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Fasilitasi TEPR, Penyelenggaraan Rakor Pengendalian Pembangunan dan monev (DAK, Bantuan Provinsi, POBL, Administrasi Pembangunan), Pembinaan Jasa Konstruksi, Fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan DAK dan Banprov, Operasional sekretariat DBHCHT (DBHCHT), Fasilitasi pembinaan BPR/BKK (DBHCHT), Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa (kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang).

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah

Kegiatan penunjang program ini berupa peningkatan Manajemen Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

c. Capaian Kinerja

Tabel. III.E.2.2
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Opini BPK	WTP	WDP	proses		
2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0,90	100%	90%	90	→
3	persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	80%	83%	80%	96,39	→
4	Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	100%	100%	100	○
5	%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	90%	100%	100%	100	○
6	% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	90%	100%	100%	100	○
7	% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.	80%	75%	85%	113,33	○
8	Persentase kenaikan PAD	7,40%	5%	10,95%	219	○
9	Rasio realisasi PAD	110%	100%	106%	105,51	○
10	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	47,54%	Menurun	43,90%	Menurun	○
11	Persentase Realisasi Belanja Modal	73,57%	80%	64,39%	80,49	↓
12	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur	98%	100%	94,82%	94,82	→
13	Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	17,12%	Meningkat	17,93%	Meningkat	○
14	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	19,25%	Meningkat	19,21%	Menurun	→

III.E.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
15	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	85,54%	90%	90,10%	100,11	○
16	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	12,54%	13,75%	13,04%	94,84	→
17	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	11,43%	10,79%	15,30%	141,81	○
18	Persentase peningkatan BUMD Berkinerja baik	70%	70%	70%	100	○
19	Persentase Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	6,12%	6,86%	11,25%	163,99	○
20	Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU)	85,00%	100%	78,29%	78,29	↓
21	Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	79,83%	100%	80,00%	80	↓
22	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur	97,86%	100%	97,32%	97,32	→
23	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	80%	78%	80,00%	102,56	○
24	Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur	73,56%	95%	91,45%	96,26	→

Keterangan Status Capaian

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Persentase Kenaikan PAD tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan realisasi capaian tahun 2016 yaitu mengalami kenaikan sebesar 3,55%. Jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,95% sedangkan Rasio Realisasi PAD ditargetkan 100% realisasinya 105,51. Rasio PAD terhadap total pendapatan juga mengalami kenaikan walaupun kenaikannya kecil sebesar 0,50 % dibandingkan pada tahun 2016 yaitu 12,54 %, menjadi 13,04 %. Persentase peningkatan BUMD berkinerja baik belum ada peningkatan, yaitu masih tetap sama dari tahun 2016 persentasenya hanya 70 % hingga tahun 2017. Persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD sudah ada peningkatan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,12 % pada tahun 2017 sebesar 11,25 %, mengalami kenaikan yang cukup signifikan hampir dua kali lipat.

Untuk persentase aset dalam kondisi baik pada tahun 2017 sudah ada peningkatan, dimana ditargetkan sebesar 78 % sudah ada peningkatan menjadi 80%; sedangkan

III.E.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

Opini BPK belum dapat diketahui dikarenakan pada saat penyusunan ini proses pemeriksaan BPK belum selesai/baru mulai pemeriksaan pendahuluan, yang ditargetkan opini BPK pada tahun 2017 WTP. Untuk persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah mengalami penurunan dari tahun 2016 48 %, tahun 2017 menjadi 43,90%, hal ini disebabkan belanja pegawai satuan pendidikan SMA/SMK/MA sejak tanggal 1 Januari 2017 menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, persentase belanja modal terhadap total belanja daerah dan persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja mengalami kenaikan sesuai yang targetkan dalam Renstra BPPKAD dan RPJMD. Sedangkan persentase Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dari 73,57a5 pada tahun 2016 menjadi 64,39% pada tahun 2017, hal ini karena adanya anggaran belanja modal yang tidak terserap yaitu kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebesar Rp. 114M. Persentase realisasi Belanja Pemeliharaan Infrastruktur pada tahun 2016 sebesar 98* sedangkan pada tahun 2017 hanya tercapai 94,82%, hal ini karena adanya sisa tender sehingga tidak terserap 100%. Perentase realisasi belanja barang dan jasa (Eks BAU) mengalami penurunan dari 85% pada tahun 2016 menjadi 78,29 pada tahun 2017, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian rekening sehingga terjadi pergeseran belanja jasa ke belanja modal. Persentase Realisasi Belanja Modal sarpras aparatur tahun 2016 sebesar 73,56% mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 91,45%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.F.4.3

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	8
	b. S-1	25
	c. DI-DIV	5
	d. SMA	28
	e. SMP	
	f. SD	2
	Jumlah	68
2	Golongan	
	a. Golongan IV	8
	b. Golongan III	40
	c. Golongan II	19
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	
	f. THL/GTT/PTT	
	Jumlah	68
3	Pejabat/Struktural	

III.E.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

No	Indikator	Jumlah
	a. Esselon II	1
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	60
	Jumlah	68

Sumber : BKD Kabupaten Wonosobo, 2017

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.F.4.4

**Kondisi Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	15.379.489.843,30
01	Tanah	3.166.882.550,00
02	Peralatan dan Mesin	7.198.659.988,30
	Alat-alat Besar	167.474.000,00
	Alat-alat Angkutan	2.717.292.867,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	64.118.000,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.915.912.026,18
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	319.365.095,05
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	14.498.000,00
03	Gedung dan Bangunan	4.964.975.305,00
	Bangunan Gedung	4.964.975.305,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.972.000,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	48.972.000,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2017

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, beberapa permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan antara lain :

Tabel III.F.4.5
Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

No	Masalah	Solusi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, hal ini disebabkan antara lain : pembayaran pajak dan retribusi tidak lancar akibat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dan Retribusi masih rendah, petugas pungut tidak langsung setor Kas daerah, masih ada komponen-komponen pajak dan retribusi yang belum tergali potensinya serta pengelolaan potensi PAD yang belum optimal.	- Modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah (aplikasi online) - Penyempurnaan landasan hukum dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi - Mengadakan sosialisasi peraturan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah - Mengoptimalkan sumber-sumber PAD.yang potensial - Mengoptimalkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
2	Efisiensi dan efektivitas belanja SKPD dalam pelaksanaan APBD belum optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan penyerapan anggaran secara berkala kepada semua perangkat daerah
3	Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD masih di bawah 100% penyebabnya antara lain Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan daerah,	Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang memadai dan berkualitas
4	Kurangnya jumlah dan kemampuan petugas pengelola aset daerah hal ini dapat dilihat dari ketepatan dan kelengkapan pelaporan aset daerah	Memaksimalkan kemampuan SDM yang ada melalui bimbingan teknis bagi pengelola aset daerah

III.E.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan